

EVALUASI KEBIJAKAN MOBILITAS BERKELANJUTAN DALAM MANAJEMEN URBAN DI INDONESIA

Nita Aribah Hanif^{1*}, Yulia Rahma Lestari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

**E-mail: dosen03015@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan mobilitas berkelanjutan di Indonesia, terutama wilayah urban. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan manajemen mobilitas yang lebih tertata untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 tentang Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Indonesia. Sumber data penelitian ini bersumber dari media massa online, data resmi pemerintah dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interaktif model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mobilitas berkelanjutan di Indonesia perlu ditinjau ulang karena masih ditemukan kebijakan yang tumpang-tindih dan menjadi tantangan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung dan runtutan program yang harus dijalankan secara sistematis. Perbaikan kebijakan mobilitas berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi di lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan program mobilitas berkelanjutan dan SDGs tujuan nomor 11. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kebijakan terkait mobilitas berkelanjutan.

Keywords : Evaluasi, Mobilitas Berkelanjutan, Manajemen Urban

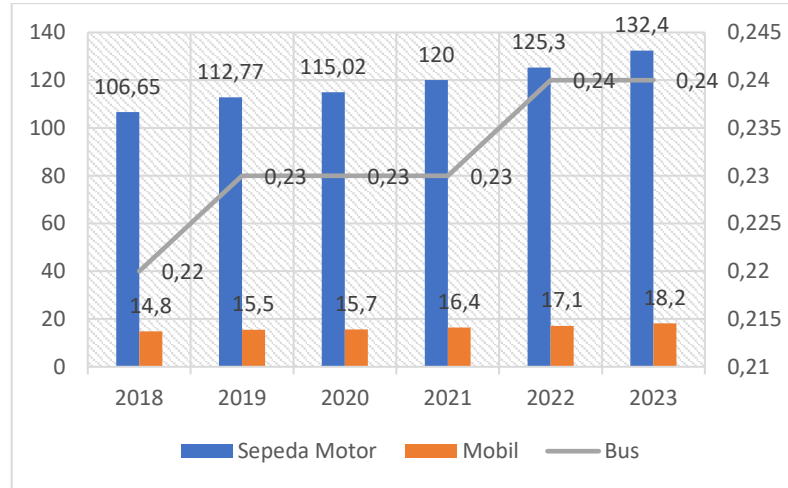
ABSTRACT

This study aims to evaluate sustainable mobility policies in Indonesia, especially in urban areas. The urgency of this study is motivated by the need for more structured mobility management to realize Sustainable Development Goals (SDGs) number 11 concerning Sustainable Cities and Communities. This research method uses a qualitative method with a case study approach in Indonesia. The data sources for this study come from online mass media, official government data and previous research. The data analysis technique used is the interactive model technique. The results of this study indicate that sustainable mobility policies in Indonesia need to be reviewed because overlapping policies are still found and are a challenge in their implementation. Policy implementation must also consider the readiness of supporting infrastructure and a series of programs that must be carried out systematically. Improvement of sustainable mobility policies is very much needed to optimize implementation in the field as a reference in the implementation of sustainable mobility programs and SDGs goal number 11. These findings are expected to be a reference for the Indonesian Government in improving policies related to sustainable mobility.

Keywords : Evaluation, Sustainable Mobility, Urban Management

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, menstimulasi kebutuhan mobilitas di wilayah urban. Fenomena ini memantik masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi guna memenuhi kebutuhan mobilitasnya.



Gambar 1. Tren Jumlah Kendaraan di Indonesia (ribu)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. Di Tahun 2018 jumlah sepeda motor di Indonesia sebanyak 106,65 ribu kendaraan, lalu di Tahun 2019 meningkat hingga 112,77 ribu kendaraan dan seterusnya hingga Tahun 2023 mencapai 132,4 ribu sepeda motor. Hal serupa juga terjadi pada penggunaan mobil pribadi, tercatat di Tahun 2018 sebanyak 14,8 menjadi 18,2 ribu kendaraan di Tahun 2023 sebagai puncak kuantitas tertinggi di Indonesia. Fakta berbanding terbalik dengan penggunaan bus yang memiliki angka stagnan selama lima tahun terakhir yakni di angka 200 ribu. Fenomena ini menunjukkan bahwa animo masyarakat saat ini cenderung lebih tertarik menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik.

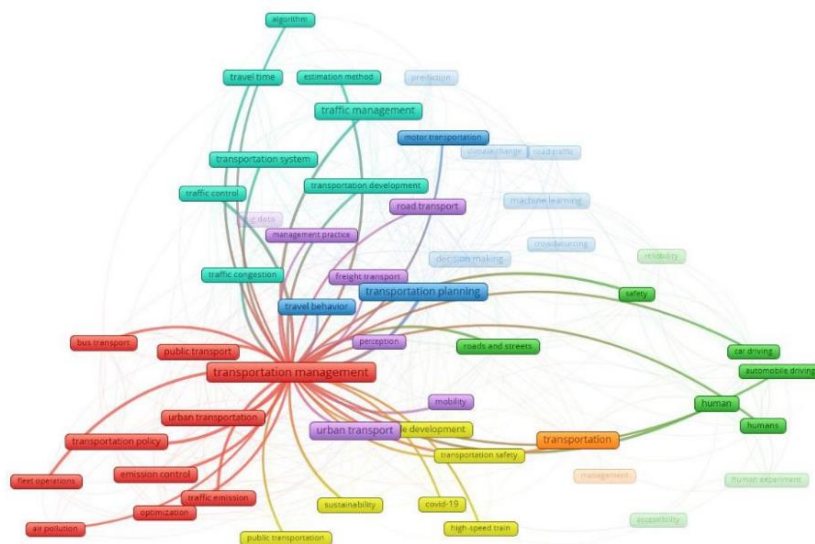
Meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi, membuat wilayah perkotaan lekat dengan permasalahan kemacetan. Kemacetan menjadi salah satu sumber polusi udara akibat emisi kendaraan yang dikeluarkan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang emisi karbon dioksida (CO₂) tertinggi di dunia mencapai 1,3 Gigaton ton CO₂ dengan persentase tertinggi bersumber dari sektor transportasi darat terutama sepeda motor dan mobil (dephub.go.id, 2024). Bahkan *The Climate Action Tracker* mengestimasi bahwa intensitas emisi di Indonesia setara dengan 3,75 – 4% dari total produksi emisi global di Tahun 2030 (IESR, 2020).

Degradasi lingkungan akibat produksi emisi jangka panjang yang meningkatkan risiko perubahan iklim global. Guna meminimalisir fenomena ini, maka Indonesia berupaya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang digaungkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Mobilitas berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekankan pada efisiensi transportasi untuk mengurangi dampak lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini termaktub dalam tujuan nomor 11, menciptakan kota dan pemukiman berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai tujuan nomor 11 tidaklah mudah

menimbang ketimpangan yang terjadi di Indonesia dalam mendukung mobilitas berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dalam mendukung mobilitas berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi publik massal, pembangunan jalur sepeda, serta kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.

Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut masih dipertanyakan, mengingat masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan rendahnya integrasi antarmoda transportasi. Evaluasi terhadap kebijakan mobilitas berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana implementasinya telah menjawab permasalahan transportasi perkotaan. Evaluasi ini juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat keberhasilan kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan manajemen urban yang lebih inklusif, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi kebijakan yang berhasil dan yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan selanjutnya. Evaluasi juga membantu dalam merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif, mengingat sektor transportasi merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca di Indonesia.



Gambar 2. Pemetaan Publikasi terkait Manajemen Transportasi
Sumber: Scopus Database (2025)

Gambar 2 merupakan hasil pemetaan publikasi artikel ilmiah terindeks scopus yang dilakukan oleh peneliti dari Indonesia pada rentang Tahun 2021 hingga 2025 dengan fokus penelitian ‘manajemen transportasi’. Pemetaan artikel ilmiah yang menggunakan Tools VOS Viewers memperlihatkan nodes berupa kata kunci yang banyak digunakan sebagai fokus riset dalam penelitian terdahulu. Adapun garis yang menghubungkan antar-kata kunci untuk menunjukkan keterhubungan antar-nodes yang kerap digunakan dalam penelitian terdahulu. Beberapa kata kunci yang termuat dalam nodes, menunjukkan fokus penelitian yang banyak digunakan pada penelitian terkait manajemen transportasi, meliputi urban transportation, public transportation serta mobility dan kata kunci lainnya. Namun dalam nodes di atas tidak ditemukan fokus penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan transportasi atau mobilitas. Hal ini merepresentasikan bahwa penelitian terkait

evaluasi kebijakan di sektor transportasi masih minim menjadi perhatian peneliti di Indonesia. Berangkat dari temuan ini, penulis mengambil gap research untuk mengevaluasi kebijakan mobilitas di Indonesia guna mengisi kekosongan penelitian terdahulu sebagai luaran teoritis.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Indonesia. Sumber data penelitian ini bersumber dari media massa online, data resmi pemerintah dan penelitian terdahulu yang diolah ulang oleh penulis. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interaktif model yang dicetuskan oleh Miles & Huberman (1998), meliputi pengumpulan data, reduksi data dan visualisasi data. Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan mengelaborasi berbagai sumber data untuk mendapat temuan dengan validitas data yang tinggi. Sejalan dengan teknik triangulasi data yang dicetuskan Denzin (1970) mencetuskan terdapat empat tipe triangulasi data dalam kualitatif. (1) triangulasi sumber data dalam satu studi; (2) triangulasi investigasi dengan melakukan banyak riset dalam kasus tertentu; (3) triangulasi metode, melibatkan berbagai metode dalam studi; (4) triangulasi teori, menggunakan berbagai perspektif untuk mengintegrasikan hasil studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis datanya, penelitian ini mengadopsi teori mobilitas berkelanjutan dari Jeon et al. (2013), yang terfokus pada dua indikator yakni efektivitas sistem transportasi dan integrasi mobilitas ramah lingkungan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Efektivitas sistem transportasi ditujukan untuk menganalisis efektivitas perjalanan dan emisi yang dikeluarkan dari moda transportasi tersebut. Transportasi publik menjadi upaya penting dalam meminimalisir emisi transportasi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam transportasi publik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan mobilitas berkelanjutan.

Tabel 1. Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia

Regulasi	Konsentrasi
UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk transportasi publik secara umum
Peraturan Pemerintah No.8/2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum	Mengatur transportasi publik barang dan penumpang
Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek	Mengatur transportasi publik tanpa lintasan khusus (ojek online)

Peraturan Menteri Perhubungan No. 98/2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus	Mengatur fasilitas minimum transportasi publik yang ramah lingkungan
---	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan yang mengatur transportasi publik. Hal ini menunjukkan terdapat dukungan pemerintah terhadap mobilitas berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur transportasi publik yang menyebabkan mereka lebih memilih menggunakan transportasi pribadi sebagaimana yang ditemukan pada beberapa studi. Atmojo *et al.* (2024) menyebutkan bahwa di D.I. Yogyakarta, transportasi publik yang diprakarsai pemerintah lokal, TransJogja, memiliki keterbatasan rute operasi yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses.

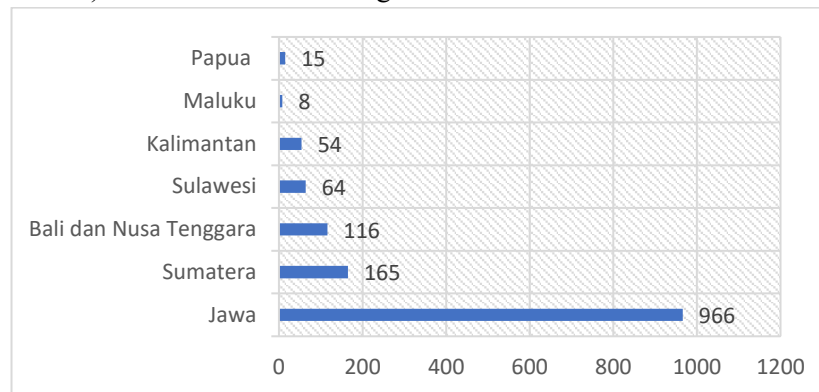
Hanif (2024) menambahkan bahwa transportasi di kota lain seperti Jakarta juga belum aksesibel untuk pengguna dari kalangan disabilitas. Ketidaktepatan waktu kedatangan transportasi publik juga menjadi alasan masyarakat beralih menggunakan transportasi pribadi sesuai kebutuhannya (Hanif, Hakim and Atmojo, 2021). Terdapat pula inkonsistensi kebijakan terkait transportasi publik, yang mana Pemerintah Indonesia mendukung penggunaan transportasi publik semi privat seperti ojek/taksi melalui aplikasi maupun manual. Penggunaan layanan transportasi publi semi-private tidak memiliki dampak signifikan bagi upaya pengurangan emisi dari sektor transportasi dan bertolakbelakang dengan upaya mobilitas berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia terlihat menerapkan kebijakan yang bersebarangan dalam periodik yang sama yang justru menjadi tupang tindih satu dengan yang lain. Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mobilitas berkelanjutan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia perlu ditinjau ulang sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan dan implementasi program.

Tabel 2 Kebijakan Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

Regulasi	Konsentrasi
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019	Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>)
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2023	Infrastruktur Pengisian Listrik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022	Konservasi Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor, dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024	Mengatur pemberian potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

	Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian kendaraan listrik
--	---

Tabel 2 merupakan kebijakan yang berkaitan dengan daya dukung Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan transportasi berbasis tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah memberi insentif untuk pembelian maupun pembayaran pajak kendaraan listrik guna meningkatkan anino masyarakat dalam beralih menggunakan kendaraan pribadi berbasis tenaga listrik. Namun kebijakan ini tidak serta-merta menarik perhatian publik untuk beralih, karena keterbatasan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia masih sangat terbatas.



Gambar 3. Persebaran SPKLU di Indonesia

Sumber: databoks.katadata.co.id (2024)

Pernyataan ini diperkuat melalui data dari Katadataboks di Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan Pembangunan SPKLU di beberapa wilayah di Indonesia. keterbatasan infrastruktur akan berpengaruh terhadap minat Masyarakat untuk menggunakan kendaraan Listrik yang kurang aksesibel. Hal ini mnejadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk mengutamakan Pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik sebelum memberikan insentif potongan pajak dan pembelian kendaraan Listrik untuk menarik minat Masyarakat menggunakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mobilitas berkelanjutan di Indonesia perlu ditinjau ulang karena masih ditemukan kebijakan yang tumpang-tindih dan menjadi tantangan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung dan runtutan program yang harus dijalankan secara sistematis. Perbaikan kebijakan mobilitas berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi di lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan program mobilitas berkelanjutan dan SDGs tujuan nomor 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M. E. *et al.* (2024) 'Dynamics of Urban Transport Arrangement Policies to Support the Achievement of Sustainable Transportation', *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(1), pp. 1–18. doi: 10.46507/jcgpp.v5i1.185.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020*. Jakarta, Indonesia. Available at:

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>.
- databoks.katadata.co.id (2024) *Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum/SPKLU di Indonesia Menurut Pulau*. Jakarta, Indonesia. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/e2011e08c6e563f/ada-1380-spkludi-indonesia-pada-april-2024-terbanyak-di-jawa>.
- Denzin, N. (1970) *An Introduction to Triangulation*. Available at: https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/10_4-Intro-to-triangulation-MEF.pdf.
- dephub.go.id (2024) *Transportasi Umum Massal Indonesia Menuju Zero Emission*. Available at: <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-umum-massal-indonesia-menuju-zero-emission> (Accessed: 5 February 2025).
- Hanif, N. A. (2024) 'Tantangan mobilitas berkelanjutan sebagai mitigasi perubahan iklim di indonesia 1', *Journal Of Government :Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 10(1), pp. 113–124. Available at: <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/viewFile/8098/3044>.
- Hanif, N. A., Hakim, M. L. and Atmojo, M. E. (2021) 'Indonesia ' S Readiness In Realizing Sustainable Transportation In Urban Transportation Management (Jakarta And Yogyakarta City Case Study)', in. SSRN. Available at: [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ssrn-4783789 \(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ssrn-4783789%20.pdf).
- IESR (2020) 'Siaran Pers: Transportasi darat sumbang emisi tertinggi dari total emisi gas rumah kaca sektor transportasi di Indonesia', *Institute for Essential Services Reform*. Available at: http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Siaran-Pers-Kendaraan-Listrik-dan-Dekarbonisasi-Sektor-Transportasi-Darat-Indonesia_29_Mar_2020.pdf.
- Jeon, C. M., Amekudzi, A. A. and Guensler, R. L. (2013) 'Sustainability assessment at the transportation planning level: Performance measures and indexes', *Transport Policy*, 25, pp. 10–21. doi: 10.1016/j.tranpol.2012.10.004.
- Miles, M. and Huberman, M. (1998) *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode*. London: Sage Publications.